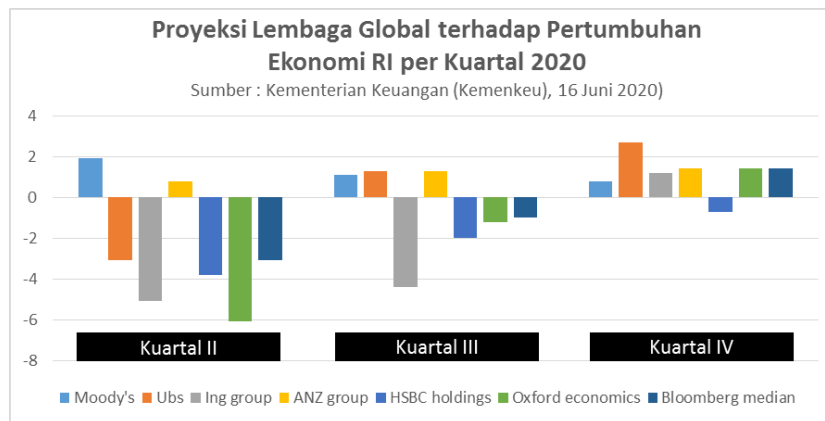


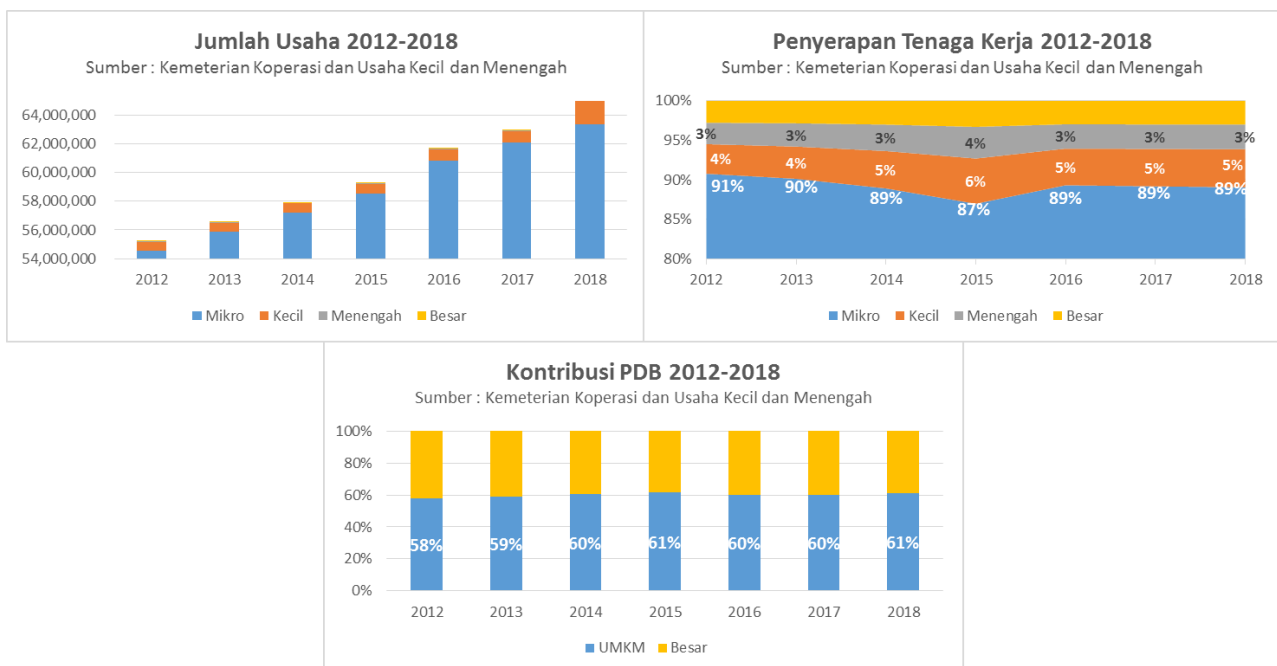
UMKM : *Kick-Start*er untuk **INDONESIA REBOUND**

Oleh : Deogracia Yolanda Nazaretha Natalia S.

Sesaat Covid-19 menyerang, pergerakan masyarakat terbatas dan melumpuhkan kegiatan ekonomi dalam jangka waktu yang relatif lama. Beberapa lembaga *survey* memperkirakan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif hingga kuartal tiga. Apa yang sudah dan harus dilakukan pemerintah Indonesia ? Dari mana harus dimulai ? Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat ?

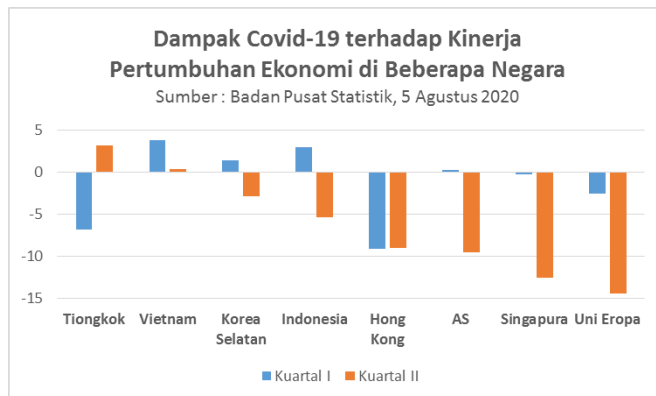


Perekonomian negara tidak terlepas dari segala usaha atau bisnis yang ada di dalamnya, yaitu Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro. Bila performa masing-masing semakin tinggi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara semakin tinggi pula. Hal tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi positif.



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi *kick-starter* Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia

Berdasarkan pangsa pasar, UMKM mendominasi komposisi jumlah usaha Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM memiliki pangsa 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia per 2018. Tidak heran, UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional serta menyumbangkan 61% PDB atas dasar harga berlaku. Kenyataan ini menunjukkan bahwa UMKM adalah tempat yang tepat untuk memupuk kembali perekonomian.



Dibandingkan negara-negara lain, dapat dikatakan Indonesia sedikit beruntung, karena proporsi PDB terbesar berasal dari UMKM. Indonesia mengalami kontraksi 5.32% pada kuartal dua tahun ini dibanding tahun lalu. Beberapa negara maju mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam. Seperti Singapura, mengalami kontraksi 12.6%, karena

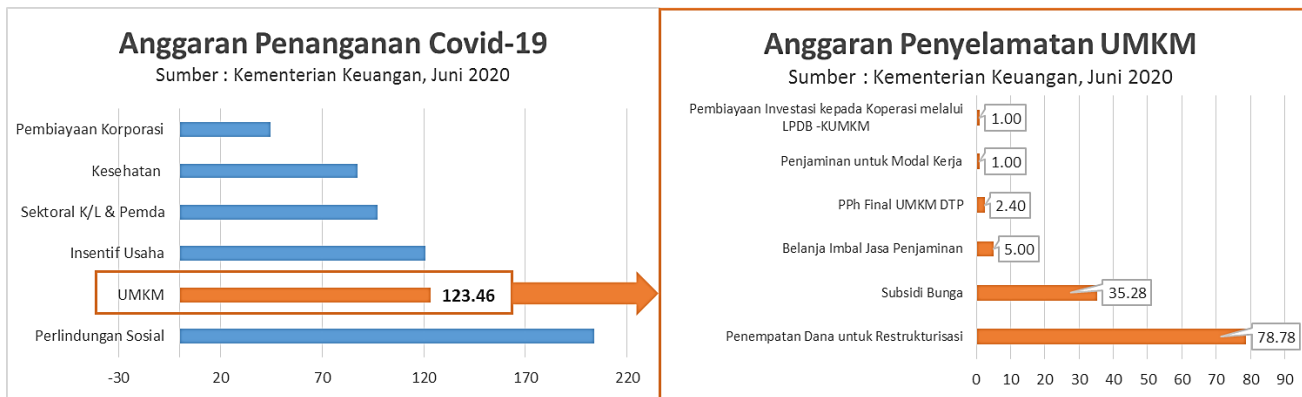
“hidup” berpegang pada *free trade* yang pastinya mengalami gangguan di masa pandemi. Begitu pula yang terjadi pada Amerika Serikat, salah satu pelaku manufaktur & ekspor terbesar di dunia yang juga mengandalkan lalu lintas ekonomi antar negara, mengalami kontraksi 9.5%.

Rata-rata penggerak ekonomi negara maju terletak di perdagangan besar dan manufaktur yang juga diekspor dengan jumlah besar. Sektor-sektor tersebut merupakan kelemahan Indonesia, tetapi kemudian menjadi keunggulan di saat pandemi ini dan berpotensi menjadi kekuatan di masa *post-pandemic*. Dalam kata lain, UMKM adalah *kick starter* Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah Sadar Potensi UMKM dan Mendukung Pembiayaan

Pemerintah sudah menyadari keunggulan dari kedudukan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Langkah mengalokasikan dana terbesar ke-2 untuk UMKM oleh Kementerian Keuangan sudah menjadi langkah tepat dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 123,46 T dari 677,2 T difokuskan untuk UMKM. 64% dari anggaran penyelamatan UMKM diarahkan untuk restrukturisasi.

Restrukturisasi meliputi kemudahan dan keringanan pinjaman usaha dalam hal bunga hingga perpanjangan jangka waktu, agar pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dan tetap *survive* sampai dapat kembali mengembalikan pinjaman. Bantuan ini dapat diakses dari bank penyedia, bila pelaku UMKM dinilai *feasible*. Artinya, belum tentu semua UMKM mampu mendapatkan bantuan ini.



Sisa proporsi anggaran penyelamatan UMKM disediakan dalam bentuk yang cukup serupa tapi tidak sama. Tidak jauh dari hal-hal yang tidak berefek langsung untuk “*si pelaku bisnis*”. Subsidi bunga didapatkan bila mampu melakukan peminjaman. PPh Final UMKM DTP bisa didapatkan jika sudah tergolong wajib pajak dan memenuhi syarat yang ditentukan. Penjaminan modal kerja cenderung lebih mudah didapatkan untuk plafon kredit di bawah 10 juta, namun akan berarti hanya bila sudah mengetahui pasti aktivitas tepat yang harus dilakukan. Pembiayaan investasi kepada koperasi bila koperasi masih menjadi unggulan para pelaku UMKM, terlebih lagi sempat dilakukan moratorium selama 3 bulan untuk Koperasi Simpan Pinjam.

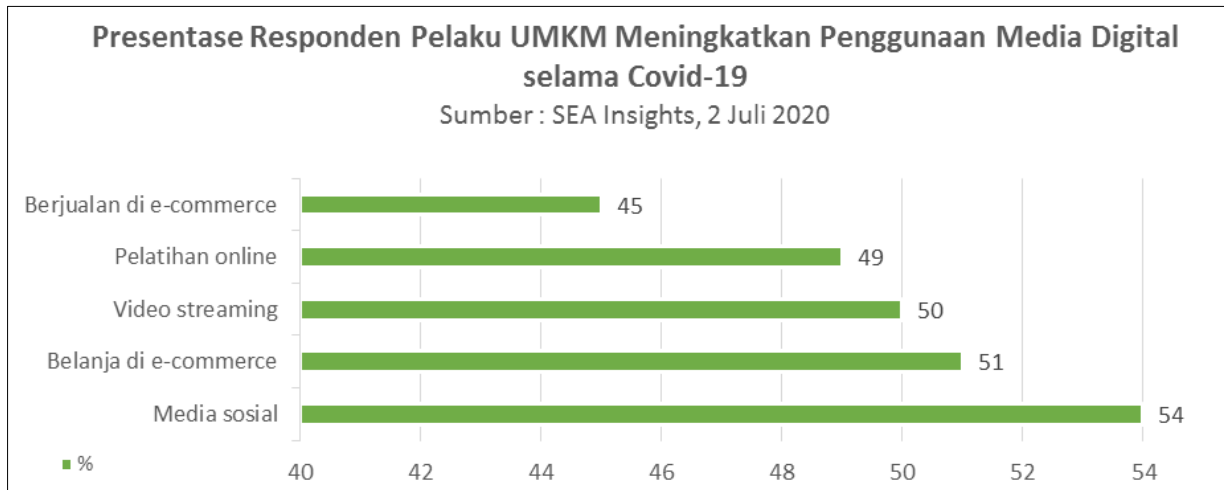
Bantuan dana dengan format saat ini sudah baik adanya, namun ada halangan selain tidak semua UMKM mampu mendapatkan bantuan tertentu. Ketika dana pinjaman didapatkan, probabilitas keberhasilan program dapat dikatakan masih rendah, karena mayoritas UMKM belum mampu mengetahui langkah dan aktivitas yang tepat.

Jika dianalogikan seperti kendaraan bermotor, bantuan dana pemerintah bagaikan bahan bakar. Saat bahan bakar tersedia, namun pengendaranya tidak tahu cara menyalakan dan menggunakannya, maka tidak akan berjalan ke manapun. “Bahan bakar” yang sudah disediakan pemerintah belum cukup untuk membantu UMKM dan memberikan efek jangka panjang. **Selain “bahan bakar”, apalagi yang dibutuhkan untuk dilakukan oleh pemerintah dan pelaku UMKM sebagai “pengendara” ?**

Cita-Cita UMKM Go Digital

Pandemi ini semakin menyadarkan pelaku bisnis dan pemerintah akan pentingnya *go digital*. Dari segi pemasaran, *digital marketing* akan mempermudah produk dan jasa yang dijual pelaku UMKM untuk dikenali oleh masyarakat luas, bahkan ke depannya dapat membantu UMKM untuk *go international*. Terlebih lagi di era yang sudah mengarah ke serba *digital* karena Covid-19. Kesadaran terlihat dari

peningkatan penggunaan *digital media* oleh pelaku UMKM yang meningkat hingga 54%. Menurut Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, 1,4 juta pelaku UMKM sudah aktif di *marketplace* dan pemerintah akan terus mendorongnya menjadi 2 juta di akhir 2020.



Kembali ke analogi kendaraan bermotor, *digital marketing* sesungguhnya bagaikan klakson yang berfungsi untuk menjangkau orang-orang supaya *aware* akan keberadaan “si pengendara”. Klakson hanya akan berbunyi bila “si pengendara” ingin melakukannya, karena ada *trigger* yang dapat dideteksi dan dikenali oleh pengendara. Pemerintah sudah mendorong dan mendukung penggunaan “klakson”. Apa yang perlu dilakukan pelaku UMKM sebagai “si pengendara” agar tahu cara penggunaan “klakson” yang benar dan efektif ? Dari sini, dapat dikatakan bahwa *digital marketing* saja belum cukup untuk meningkatkan level UMKM dan menciptakan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable business*).

Pendataan *profile* dan *performance* UMKM akan mempermudah proses analisa kondisi bisnis dan diharapkan berujung pada pembinaan lebih dalam dan *customized* sesuai dengan karakteristik UMKM, serta dapat dipahami pelaku pebisnis. Hal ini dapat direalisasikan bila ada ekosistem *digital* yang diciptakan khusus untuk UMKM. Kemenkop UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merealisasikan hal tersebut. Saat ini 9.4 juta dari 10 juta pelaku UMKM sudah masuk ke ekosistem UMKM.

Kembali ke analogi kendaraan bermotor, data-data yang sudah diolah tersebut akan menjadi indikator-indikator yang dapat dilihat oleh “si pengendara” dari “*dashboard*”. Dalam kata lain, pelaku UMKM terbantu dalam menganalisa kondisi internalnya, bila dianalogikan sebagai berikut :

1. “Berapa banyak bahan bakar yang tersedia ?” atau “Berapa modal yang tersedia dan dibutuhkan ?”

2. “Berapa jarak yang sudah ditempuh ?” atau “Sejauh apa pertumbuhan unit bisnis berdasarkan jumlah penjualan dan jumlah konsumen ?”
3. “Berapa kecepatannya ?” atau “Apakah langkah yang diambil cukup cepat untuk mencapai target ?”
4. “Berapa temperatur mesin ?” atau “Apakah kondisi seluruh sumber daya pada bisnis Anda cukup baik atau perlu penambahan, perbaikan, ataupun pelatihan ?”
5. “Berapa rotasi per menit nya ?” atau “Seberapa kompetitif produk/jasa yang Anda jual terhadap kompetitor lokal dan internasional ? Apakah kualitas dan harga sudah seimbang dan kompetitif ?”

“Bahan bakar”, “*dashboard*”, dan “klakson” pada kendaraan bermotor yang berarti pada unit UMKM sudah disediakan pemerintah. Pertanyaan besarnya tertuju pada “si pengendara” atau pelaku UMKM, “Apakah mengerti cara kerjanya ? Apakah dapat menggunakan fitur tersebut ? Apakah sudah bisa menggunakannya secara mandiri atau masih perlu dibimbing ?”. Kecakapan sumber daya manusia ini menjadi rintangan yang perlu dihadapi pemerintah dan segenap pelaku UMKM.

Upaya Meningkatkan Kecakapan atau Kualitas Sumber Daya Manusia

Guna menanggapi rintangan ini, Kemenkop dan UKM sudah menyelenggarakan *e-Learning* untuk para pelaku UMKM. Layanan ini diberikan secara gratis dan dirancang sebagai persyaratan untuk mendapatkan fasilitas lanjutan yang selanjutnya dapat diakses dari Kemenkop guna memastikan pelaku UMKM sudah siap “bertempur” di pasar dengan para kompetitor.

Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 memberikan Kartu Pra-Kerja juga kepada pelaku UMKM, yang semula hanya untuk angkatan kerja. Pelatihan ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang siap kerja dan mempunyai kemampuan kewirausahaan. Pelatihan diberikan oleh ribuan mitra dengan berbagai tema yang dapat dipilih pemegang Kartu Pra-Kerja. Bahkan, untuk mengakses dan mendaftar pelatihan sudah sangat dipermudah melalui *website* Kementerian Tenaga Kerja.

Ada kesamaan antara kedua penyelenggaraan pelatihan tersebut. Pertama, yaitu pelaku UMKM hanya akan mendapatkan pelatihan bila mendaftar. Artinya, **pendaftar adalah orang yang sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya membenahi *hard skill* dan *soft skill***. Sisanya yang mungkin belum berminat, tidak akan mendapatkan ilmu baru, kecuali bila berusaha mencarinya sendiri di luar fasilitas pelatihan ini. Kedua, yaitu **jenis pelatihan yang diikuti dipilih sendiri oleh pendaftar**, padahal kemungkinan besar mayoritas pelaku UMKM belum sadar akan kebutuhan jenis pelatihan.

Langkah UMKM dan Pemerintah yang Dapat Dikembangkan

Hal yang dapat dilakukan pelaku UMKM adalah membuang mental pedagang biasa yang cepat puas dan “yang penting jualan”. Mari tanamkan mental bisnis. Caranya dengan mengenali tujuan dan kebutuhan Anda, lalu cari tahu pelatihan/ sertifikasi dari pemerintah ataupun secara mandiri, serta serap terus ilmu praktis sehingga kemampuan analisa kondisi eksternal dan internal untuk mencari *opportunity* serta meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dijual semakin bertambah. Dengan begitu, UMKM dapat menyajikan produk dan jasa yang berkualitas baik, menarik, dan kompetitif di pasaran. UMKM juga akan semakin terbentuk secara administrasi dan pembukuan, sehingga pengelolaan finansial lebih baik. Diharapkan UMKM bisa menjadi unit bisnis yang berkesinambungan (*sustainable business*).



Kembali ke analogi kendaraan bermotor. Seperti gambar di atas, “pengendara” ada baiknya didampingi oleh “pelatih & pengawas”, yaitu pemerintah atau lembaga yang diberikan kepercayaan. Dengan bimbingan langsung, pelaku UMKM akan mendapatkan asistensi intensif di lapangan yang dinamis, jadi tidak hanya berpegang pada teori dari pelatihan. Dengan begitu, “pengendara”/UMKM lebih terarah, lebih cepat mahir, dan lebih terjaga dalam proses belajarnya. Penggunaan instrumen bantuan pemerintah juga diharapkan lebih efektif.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas bimbingan terbatas, sebab jumlah UMKM sangat besar. Hingga saat ini, ada beberapa lembaga yang ditunjuk dan lembaga independent (non-pemerintah). Walaupun bisa mempercepat penyebaran bimbingan karena terkesan ada perpanjangan tangan,

penyelenggara lebih baik bila dari satu lembaga / institusi yang ditetapkan, agar pendataan dapat lebih rapih dan *progress* bisa dipantau dengan seksama.

Jika dapat mengusulkan, akan lebih baik bila semua “pengendara”/pelaku UMKM secara merata dibimbing dengan porsi atau tingkatan yang disesuaikan dari klasifikasi jenis UMKM, sektor UMKM, dan jenis kelemahan yang harus diperbaiki.. Dengan kata lain membuat *competency matrix* untuk *hard skill* dan *soft skill* khusus UMKM. Setiap level diresmikan melalui sertifikasi dan bimbingan *post-certification* dalam beberapa bulan. Alangkah lebih baik, bila proses ini dilakukan dengan mengundang UMKM bersangkutan, bukan “*siapa berminat silahkan daftar*”, agar penyebaran kompetensi merata. Ketika masa bimbingan sudah usai, maka dapat berpindah pada “pengendara” yang lainnya hingga seluruh UMKM terlayani sepenuhnya.

MATRIX KOMPETENSI (Contoh)									
SEKTOR	HARD SKILL 1			HARD SKILL 2			HARD SKILL -N		
	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah
Perdagangan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Pengolahan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Pertanian				Level 1	Level 2	Level 3			
Perkebunan				Level 1	Level 2	Level 3			
Peternakan				Level 1	Level 2	Level 3			
Perikanan				Level 1	Level 2	Level 3			
Jasa				Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3

Contoh Skema Certification dan Post-Certification UMKM Perdagangan									
HARD SKILL 1-2-3	Tahun ke-1				Tahun ke-2				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Level 1	25%	50%	75%	100%					
Certification	25%	50%	75%	100%					
Post-Certification		25%	50%	75%	100%				
Level 2		25%	50%	75%	100%				
Certification		25%	50%	75%	100%				
Post-Certification			25%	50%	75%	100%			
Level 3			25%	50%	75%	100%			
Certification			25%	50%	75%	100%			
Post-Certification				25%	50%	75%	100%		

“Pengendara” dengan lisensi/sertifikasi tentunya akan lebih mengenali kendaraannya. dalam hal ini kondisi internal unit usaha yang dapat dipantau dari “*dashboard*”, serta lebih jeli dalam melihat kondisi jalan yang merupakan kondisi eksternal pasar. “Penumpang” yang tertarik dengan “klakson” yang

dibunyikan, juga akan lebih percaya untuk masuk ke dalam kendaraan. Artinya, masyarakat berhasil ditarik menjadi konsumen loyal dari UMKM tersebut.

Umpan dari pemerintah berupa dana, ekosistem UMKM, dan pelatihan sudah tersedia, terlepas dari beberapa kekurangan yang ada. Namun, cara kita sebagai pelaku UMKM yang akan mempengaruhi masa depan diri sendiri, usaha sendiri, lingkungan terdekat, dan Indonesia. Maka dari itu, sebagai bagian yang tidak terlepas dari ekosistem perekonomian Indonesia dan kontributor PDB terbesar, mari kita sebagai individu pelaku UMKM berpartisipasi aktif menjadi *kick starter* Pemulihan Ekonomi Nasional dari hal yang paling dasar. Dimulai dari sikap yang tidak mudah menyerah, tidak cepat puas, dan selalu ingin meningkatkan *skill*, hingga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis.

Pemerintah pun diharapkan tidak terperangkap dalam fokus memberikan dana bantuan sebagai “bahan bakar”, menciptakan ekosistem sebagai “*dashboard*”, mendukung langkah *go digital* sebagai “klakson”. Pemerintah perlu semakin fokus pada kecakapan sumber daya manusia. Tidak hanya menyelenggarakan pelatihan lepas, tetapi juga bimbingan intensif, bila perlu menghadirkan *direct supervisory* guna menjaga kualitas UMKM sebagai *kick starter* Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mari saling berkolaborasi dan bersinergi. Salam Indonesia Rebound.

SUMBER DATA

1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/30/proyeksi-lembaga-global-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-ri-per-kuartal-2020>
2. [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)
3. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/05/dampak-covid-19-terhadap-kinerja-pertumbuhan-ekonomi-di-beberapa-negara#>
4. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/12/anggaran-penyelamatan-umkm-mencapai-rp-12346-triliun>
5. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/10/anggaran-penanganan-covid-19-naik-jadi-rp-6772-triliun>
6. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/03/pandemi-covid-19-pacu-umkm-gunakan-media-digital#>
7. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200810205404-92-534250/kemenkop-ukm-bidik-10-juta-umkm-go-digital-akhir-2020>
8. <https://money.kompas.com/read/2020/08/12/144141926/kemenkop-ukm14-juta-umkm-sudah-go-digital>
9. <https://katadata.co.id/agungjatmiko/digital/5f4e6186219c3/menkop-ungkap-tiga-sektor-umkm-yang-banyak-masuk-ekosistem-digital>
10. <https://money.kompas.com/read/2020/04/30/180700226/ada-pelatihan-online-gratis-untuk-umkm-minat->